

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:


**INDAH RAHMAYANI
NPM :148330074**

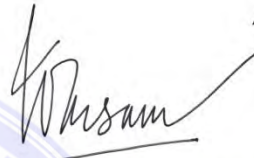



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

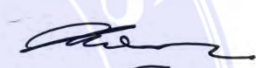
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara
Nama : Indah Rahmayani
NPM : 14.833.0074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Linda Lores, SE, M.Si
Pembimbing I


Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM
Pembimbing II


Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 06 Juni 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 06 Juni 2018

Indah Rahmayani
148330074

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rahmayani
NPM : 148330074
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty –free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 Agustus 2018
Yang menyatakan


(Indah Rahmayani)

ABSTRACT

The purpose of this study was to test and provide empirical evidence about the Influence of Government Accounting Standards and Financial Management Implementation of the Quality of Financial Statements with the Secretariat of the General Elections Commission (KPU) North Sumatra. This type of research used in this research is associative Causal, the population of which is used by researchers is the Secretariat of the Commission of North Sumatra, while the samples used in this study were all employees who work in the Commission in North Sumatra Province, and the Commission of Medan, the Commission Tebing Tinggi, KPU city Pematangsiantar and the Commission Simalungun district. involved in the financial management that consists of one person Budget Authority (KPA), 1 Committing Officer (CO) and 5 Staff Financial Management, in order to obtain a sample of 35 people. R^2 T-test and test-F). The results of this study indicate that the implementation of government accounting standards and significant positive effect on the quality of the Commission's financial statements of North Sumatra province, and the results showed that the implementation of financial management and significant positive effect on the quality of the financial statements of the Commission's Sumatra province Utara. Penelitian develop independent variables, application government accounting standards and the implementation of financial management to improve the quality of financial reporting.

Keywords: *Government Accounting Standards, Implementation of Financial Management and Quality of Financial Reports.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif Kausal, populasi yang digunakan peneliti adalah Sekretariat KPU Sumatera Utara sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU kota Medan, KPU kota Tebing Tinggi, KPU kota Pematangsiantar dan KPU kabupaten Simalungun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari 1 orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 5 orang Staff Pengelolaan Keuangan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 35 orang. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data (Uji validitas dan Uji reliabilitas), Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji hipotesis (Uji R^2 Uji-t dan Uji-F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan KPU provinsi Sumatera Utara, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan KPU provinsi Sumatera Utara. Dan secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas laporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Ali Rohmad dan Ibunda Legiyem Damanik tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa dan juga untuk abang aripin dan adik-adik tersayang awlia dan ridho.
2. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE. MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution,SE,MSi,Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

5. Ibu Linda Lores, SE. MSi selaku dosen pembimbing I telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis.
8. Sahabat terbaik Suci, Nurmaini, Putri, Kasidah, Rati, Geo, Elpriani, Dyah, Dian, Nursanti, Reka, yang telah memberikan dukungan dan semangat, yang akan penulis kenang sampai kapanpun dan juga teman-teman terbaik seangkatan Malida, Wardah, Ulfa, Rahmi, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dalam pencapaian penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga ALLAH SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Medan, 06 Juni 2018
Penulis

INDAH RAHMAYANI
148330074

DAFTAR ISI

ABSTRACTii
ABSTRAKiii
RIWAYAT HIDUPiv
KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIvii
DAFTAR TABELix
DAFTAR GAMBARx
DAFTAR LAMPIRANxi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Teori - Teori.....	8
2.1.1 Standart Akuntansi Pemerintahan	8
2.1.2 Implementasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah	14
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan	22
2.1.4 Hubungan Penerapan Standart akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Keuangan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian	28
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.3 Variabel Penelitian.....	32

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.2 Gambaran Umum Responden.....	48
4.3 Uji Kualitas Data	51
4.4 Pembahasan	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual	28
Gambar IV.2 : Struktur Organisasi.....	44
Gambar IV.3 : Uji Normalitas	54
Gambar IV.4 : Uji Heterokedastisitas.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.2	: Waktu Penelitian.....	30
Tabel III.3	: Daftar Populasi Penelitian	30
Tabel III.4	: Daftar Sampel Penelitian	31
Tabel III.5	: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran	33
Tabel IV.6	: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel IV.7	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	49
Tabel IV.8	: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel IV.9	: Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	50
Tabel IV.10	: Statistik Deskriptif.....	51
Tabel IV.11	: Uji Validitas.....	52
Tabel IV.12	: Uji Realibilitas.....	53
Tabel IV.13	: Uji Normalitas	54
Tabel IV.14	: Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel IV.15	: Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel IV.16	: Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (r^2).....	59
Tabel IV.17	: Uji t	60
Tabel IV.18	: Uji f.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Kuisisioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain asas tersebut dalam rangka penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh komite standart yang independen dan ditetapkan dengan peraturan

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa di kantor KPU medan ini menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Posisi Keuangan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Operasional
5. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dn memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat dipahami artinya dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP 71, Tahun 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Untuk itu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum

mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Implementasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, jika implementasi pengelolaan keuangannya baik maka kualitas laporannya pun baik. Jadi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini sudah membuat implementasi pengelolaan keuangannya secara jelas. Misalnya dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan anggarannya untuk biaya APBN/APBD dan anggaran operasionalnya sudah disajikan secara transparan dan relevan sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu hal yang mendasar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kementerian keuangan dan sudah disajikan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yang berdasarkan kaidah-kaidah, pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, dan laporan keuangannya sudah di audit setiap tahunnya.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, maka di kantor KPU harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk

menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang berkualitas akan mampu memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan sangat perlu diperhatikan, dan pada saat ini banyak yang membicarakan tentang hal itu, misalnya banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah indonesia masih menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan kurang baiknya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas dapat diadakan penyempurnaan bahwa Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi & Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan bagian yang penting dan tidak bisa terpisahkan dari kualitas informasi keuangan. Untuk itu, pada kantor KPU harus menyusun, mendesain, mengoperasikan, dan memelihara laporan keuangan yang baik dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas.

Untuk itulah didalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “ **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Implementasi Pengelolaan Keuangan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu :

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

2. **Bagi Perusahaan,** diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja keuangan di kantor KPU sehingga dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan untuk menilai kualitas laporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.
3. **Bagi Peneliti Lain,** diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori – Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah “pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan”.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa laporan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus dibolehkan apabila diperlukan sepanjang berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanjung (2008:8-9) mengatakan bahwa “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.”

Menurut Nordiawan dan Hertianti, (2010) “Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku.” SAP merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

tentang keuangan negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

b. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki tujuan untuk:

1. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
2. Manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder.
4. Keseimbangan antargenerasi, memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pengguna laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, maka pelaporan keuangan lebih berkualitas. (Mahmudi, 2010:29).

d. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan

keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Nurlan Darise (2012 : 55) dapat dijelaskan prinsip akuntansi yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

2. Nilai Historis

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada suatu perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk meyakinkan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut dapat diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

6. Konsistensi

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada

lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.2 Implementasi Pengelolaan Keuangan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab (2006:64)).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Implementasi pengelolaan keuangan KPU dapat daitikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kaitan pengelolaan

keuangan oleh individu - individu / pejabat - pejabat atau kelompok / kelompok pemerintah yang berada di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah dibuat dalam keputusan kebijakan yaitu keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/ Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

a. Penyusunan Anggaran

Manfaat penyusunan anggaran adalah :

1. Adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan.
3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan.

4. Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga setiap aktivitas dapat dinilai kerjanya.
5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik dan menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik.

b. Pelaksanaan Anggaran

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Setelah suatu anggaran dimulai (1 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tiga hal yaitu :

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggungjawab mereka.
2. Untuk terselenggaranya pengendalian intern dalam menghindari terjadinya penyelewengan.

3. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

c. Pembukuan dan Penatausahaan

Pada prinsipnya kegiatan tata usaha keuangam dapat dibagi dua jenis yaitu :

1. Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya.
2. Tata Usaha Keuangan, tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukam di bidang keuangan berdasarkan prosedur yang ditetapkan sehinningga dapat meberi informasi di bidang keuangan

d. Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan, menilai kondisi keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi implementasi pengelolaan keuangan.

e. Manfaat implementasi pengelolaan keuangan pemerintah

1. PSAP No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan dalam menyusun laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi berikut ini (Mardiasmo, 2009):

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya keuangan jangka pendek unit pemerintahan.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi

dan alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan operasional.

- e) Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manjerial dan organisasional.

2. PSAP No. 2 (Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas)

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu (Salamun, 2007).

Tujuan dari laporan realisasi atau perhitungan anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Asrori, 2010). Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk APBD, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan selama suatu periode tertentu. APBD terdiri atas annggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Definisi pendapatan LRA menurut SAP Berbasis Akrual tidak sama dengan definisi pendapatan menurut SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah. Sementara pendapatan LRA adalah semua

penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

3. PSAP No. 3 (Laporan Arus Kas)

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, investasi, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan dari penyusunan laporan arus kas adalah agar laporan tersebut dapat disajikan mengenai perkembangan kas yang menjadi informasi keuangan tentang sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan (Salamun,2007).

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus kas keluar misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan.

4. PSAP No. 4 (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menyajikan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik.

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut (Salamun, 2007 : 107-108) :

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan dan pencapaian target pada APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun plaporan, yang dimuat dalam ikhtisar pencapaian kinerja keuangan adalah ikhtisar tentang realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik.
- c. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk

diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu :

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

- masa lalu. Informasi yang relevan berarti informasi yang disajikan dengan tepat waktu dan lengkap sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan.
2. Andal, menyajikan informasi dengan fakta yang jujur, dan dapat diverifikasi, juga menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan yang material.
 3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
 4. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

b. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan

Laporan keuangan pemerintahan merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan, dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi, atau transaksi lainnya. Bentuk laporan keuangan pemerintahan ini berisi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh banyak faktor, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Tujuan laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Laporan keuangan swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Government Accounting Standard Board (2009) adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya.
2. Melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan..

2.1.4 Hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk bisa dipertanggungjawabkan.

b. Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan penatausahaan keuangan. Tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban tercipta dengan baik sehingga kinerja yang diharapkan menjadi naik pula. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud apabila entitas pemerintah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara kualitas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara”.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Azlim 2012	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD di kota Banda Aceh	Independen (x): <i>good governance</i> , Standar Akuntansi Pemerintahan. Dependen(y): Kualitas laporan keuangan.	Bahwa penerapan <i>good governance</i> dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di kota Banda Aceh.
2	Kusumah 2012	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya)	Independen (x) : Penerapan standar akuntansi pemerintahan Dependen (y) : Kualitas laporan keuangan	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Ovita Charolina (2013)	Pengaruh Impementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Prov Bengkulu.	Independen (x) : implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja. Dependen (y) : Kualitas Laporan Keuangan	Bahwa implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Nugraheni dan Subaweh (2008)	Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Independen : Penerapan SAP, Pengetahuan Pengelola, Ketersediaan Sarana Prasarana Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan SAP di Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan

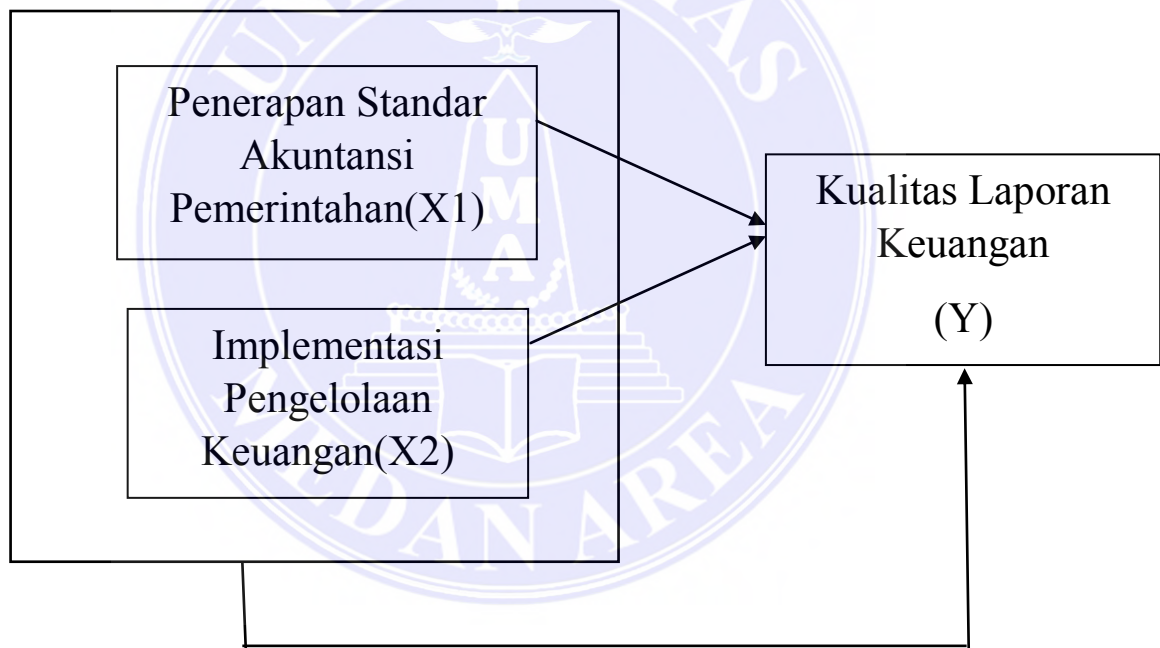
				keuangan. Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pengelola UAPPAEI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
5.	Mohammad Azwan (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang.	Independen: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan <i>Good Governance</i> . Dependen : Kualitas laporan keuangan.	Terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, variabel kualitas aparatur pemerintahan dan <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah “Penelitian terdahulu judulnya pengaruh penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel independennya adalah *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan dan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian ini judulnya tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan variabel independennya yaitu

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan.”

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian mencoba menghubungkan antara penerapan Standar Akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan (penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban), dengan kualitas laporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.



Gambar II. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan. Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H2 : Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono(2010:37) yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013, terhadap kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 pada kantor KPU Sumatera Utara.

3.1.2 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini, maka penulis langsung melakukan observasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara di Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Medan, Sumatera Utara. Telp. 061-4538626.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun rincian kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018. Rincian kegiatan ini dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III. 2
Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	2017		2018				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar-Apr	Mei	Juni
1	Pengajuan Judul Skripsi	■						
2	Pembuatan Proposal		■					
3	Bimbingan Proposal			■				
4	Seminar Proposal				■			
5	Pengumpulan data dan analisis data				■			
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi					■		
7	Seminar Hasil						■	
8	Sidang Meja Hijau							■

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012,119) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Tabel III.3
Daftar Populasi Penelitian

Instansi	Alamat	Telepon
KPU Prov Sumatera Utara	Jl.Perintis Kemerdekaan No.35 Medan	061-4538626
KPU Kot a Medan	Jl. Kejaksaan No.37 Medan	061-4513031

KPU Kota Tebing Tinggi	Jl. RSU 8, Tebing Tinggi	0621-326631
KPU Kota Pematang Siantar	Jl.MerdekaNo.3 Pematangsiantar	0622-435432
KPU Kab. Simalungun	Jl .Asahan Km 3,5 Pematangsiantar	0622-7553183

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:62) “ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2013:124) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh responden atau sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada sekretariat KPU Sumatera Utara. Adapun responden penelitian ini terdiri dari pegawai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPA), dan staff pengelolaan keuangan sehingga diperoleh sampel sebanyak 35 pegawai. Alasan memilih sampel jenuh sebagai teknik penentuan sampel karena populasinya dianggap kecil atau kurang dari 100.

Tabel III.4
Daftar Sampel Penelitian

Sekretariat KPU	Responden Penelitian			
	KPA	PPK	Staff Pengelola Keuangan	Jumlah
KPU PROV. SUMATERA UTARA	1	1	5	7
KPU Kota Medan	1	1	5	7
KPU Kota Tebing Tinggi	1	1	5	7
KPU Pematangsiantar	1	1	5	7
KPU Kab. Simalungun	1	1	5	7

Sumber : Data diolah penulis, 2018

3.3 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Sugiyono (2011:60) Variabel dependen, yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang dikembangkan dari indikator variabel yang meliputi nilai relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas Laporan Keuangan ; Laporan keuangan merupakan suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu dan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana. Kualitas Laporan Keuangan yang dibuat sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 yang dikembangkan dari indikator variabel yang meliputi nilai relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

3.3.2 Variabel Independen (Bebas)

Menurut Sugiyono (2011:61) Variabel independen, yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan.

a. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)*

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. Tujuan utama diterapkannya standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami para pengguna laporan keuangan.

b. Implementasi Pengelolaan Keuangan (X2)

Implementasi pengelolaan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kaitan pengelolaan keuangan oleh individu / kelompok pemerintah yang berada di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Pengukuran variabel ini juga dikembangkan berdasarkan indikator sesuai dengan keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/ Tahun 2011.

Tabel III.5
Definisi Operasional dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Standar Akuntansi Pemerintahan	Penerapan SAP akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam membentuk pemerintahan yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran. 2. Penyajian informasi lengkap mengenai pos-pos dalam laporan keuangan. 3. Pertanggungjawaban pengelolaan dana. 4. Pengelolaan asset, kewajiban, dan modal. 	Skala likert
Implementasi Pengelolaan Keuangan	Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KPU Medan yang digunakan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan anggaran. 2. Pelaksanaan anggaran. 3. Pembukuan dan penatausahaan 4. Pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. 	Skala likert

Kualitas Laporan Keuangan	Merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	1.Mempunyai nilai yang relevan. 2.Mempunyai nilai keterandalan. 3.Dapat dibandingkan. 4.Dapat dipahami dengan baik oleh pemakai informasi.	Skala likert
---------------------------	--	---	--------------

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015 :35) Metode Kuantitatif adalah “Penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena datanya dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasilnya dari suatu pengukuran dari skala likert. Pengukuran atau penilaian variabel dengan acuan sebagai berikut :

- a. Jika responden menjawab “5” berarti Sangat Setuju, diberi nilai 5.
- b. Jika responden menjawab “4” berarti Setuju , diberi nilai 4.
- c. Jika responden menjawab “3” berarti Netral, diberi nilai 3.
- d. Jika responden menjawab “2” berarti Tidak Setuju, diberi nilai 2.
- e. Jika responden menjawab “1” berarti Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengisian kuesioner dari para responden, yaitu para semua pegawai yang bekerja di kantor Sekretariat KPU Sumatera utara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

3.5 Teknik pengumpulan data

3.5.1 Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) “ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara”. Jadi peneliti melakukannya dengan mengumpulkan aturan-aturan atau dokumen-dokumen yang ada di kantor Sekretariat KPU Sumatera Utara yang akan diperlukan untuk penelitian, terutama untuk melakukan analisis inti masalah.

3.5.2 Kuosioner

Menurut sugiyono (2012:192) “ Kuosioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawab”. Jadi kuosioner dalam penelitian ini berisi tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan implementasi pengelolaan keuangan (X2) serta kualitas laporan keuangan (Y).

3.6 Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012: 141) “ Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskripsi dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2012:52) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.” Suatu kuesioner

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2012:47) “Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” Pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha $> 0,60$ dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha $< 0,60$.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Danang Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut: “Selain uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas, uji asumsi

klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.”

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: a) *tolerance* *valued* dan lawannya b) *Variance Inflation Faktor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- b) *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139):” uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Suyoto (2007 : 94) heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

d. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara ketiga variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh (Standar Akuntansi Pemerintahan X1), (Implementasi Pengelolaan keuangan X2) terhadap variabel dependen yaitu (Kualitas Laporan Keuangan Y). Menurut

Sugiyono (2010:277) adalah sebagai berikut :“Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Model Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1= Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Implementasi Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta

β_1 & β_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.

ε = Error

4. Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

a. Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Ghazali (2012: 97) ” Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. “ Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau

satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b. Uji Statistik t (Parsial)

Pengujian Parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
- b) Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung $>$ t tabel untuk $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 diterima dan H_a ditolak jika t hitung $<$ t tabel untuk $\alpha = 5\%$

c. Uji F (Simultan)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ardi, Kusumah. 2012. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya**. Skripsi Jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi: Universitas Siliwangi.
- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar.2012. **Pengaruh Penerapan *good governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh**. Jurnal Akuntansi : Volume 1, Nomor 1, November 2013.
- Dhedy, Triwardana. 2017. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan SPKD**. Jurnal JOM: Volume 4, Nomor 1, Februari 2017.
- Erna sari, Saiful, Nila Aprila. 2013. **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Daerah**. Jurnal Fairness: Volume 3, Nomor 3, November 2013.
- Ghozali 2011. **Aplikasi Analisis Mulvariat dengan Program IBM SPSS 19**.Edisi Kelima. UNDIP. Semarang.
- Kusumah, Arif A 2012. **Pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPD pemerintah kota Tasikmalaya**. Jurnal Akuntansi : Volume IX, Nomor 2, November 2013.
- M.Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR.Sri Pancawati Martiningsih. 2016. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9, Nomor 1, April 2016.
- Mahmudi,2010.**Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Edisi Kedua. UPP STIM.Yogyakarta .
- Mardiasmo, 2009. **Akuntansi Sektor Publik**.Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mia Oktarina, Kharis Raharjo, Rita Andini. 2016. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di kota Semarang**. Jurnal of accounting: Volume 2, Nomor 2, Maret 2016.
- Mochamad Iqbal, Alfarisyi. 2012. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**. Skripsi Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Bandung.

- Ovita Charolina, Husaini, Abdullah. 2013. **Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)**. Jurnal Fairness: Volume 3, Nomor 3, November 2013.
- Purwanati Nugraheni, Imam Subaweh. 2008. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**. Jurnal Ekonomi Bisnis: Nomor 1, Volume 13, April 2008.
- Puji, Santoso. 2016. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung**. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2012. **Statistika untuk penelitian**. Bandung : Alfabeta
- Sugiyoo. 2013. **Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)**. Cetakan Ketiga. Alfabeta : Bandung.
- Tanjung, A. Hafiz. 2008. **Akuntansi pemerintahan daerah, konsep dan aplikasi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan)**. Cetakan kedua. Alfabeta: Bandung.
- Warisno. 2008. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi**. Tesis Pascasarjana: USU Medan
- Yusup, Komarudin. 2010. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**. Skripsi Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.

LAMPIRAN 1

KUOSIONER

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
SUMATERA UTARA**

DAFTAR PETUNJUK PENGISIAN KUOSIONER :

1. Kuosioner ini tidak mencantumkan nama responden dengan harapan agar Bapak/Ibu dapat mengisi kuosioner ini dengan seobjektif mungkin.
2. Berikan tanda silang (√) pada salah satu alternatif pilihan pernyataan yang terdiri dari :
 1. SS = Sangat Setuju
 2. S = Setuju
 3. N= Netral
 4. TS = Tidak Setuju
 5. STS = Sangat Tidak Setuju

Identitas Responden

Umur	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Masa Kerja	:	

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS

Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)

1	Pengelola keuangan selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran dengan tepat waktu.					
2	Pengelola keuangan menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas.					
3	Pengelola keuangan bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara dengan tepat waktu.					
4	Pengelola keuangan selalu menyajikan Catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
5	Pengelola keuangan bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.					
6	Pengelola keuangan bisa memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur.					
7	Pengelola keuangan bisa memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.					
8	Pengelola keuangan dapat membuat cara untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian atas asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.					

Implementasi Pengelolaan Keuangan (X2)

9	Dalam penyusunan anggaran dibuat perencanaan anggaran yang jelas.					
10	Penyusunan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan kerja.					
11	Dalam pelaksanaan anggaran menetapkan prosedur yang telah ditetapkan.					
12	Pelaksanaan anggaran digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.					

13	Penatausahaan keuangan berkaitan dengan bagaimana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBN/APBD.					
14	Penatausahaan keuangan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.					
15	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN/APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					
16	Membuat laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.					

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

17	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
18	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.					
19	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan yang disajikan.					
20	Penyajian/ penerbitan laporan keuangan disajikan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi.					
21	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode selanjutnya.					

22	Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.							
23	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.							
24	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.							

LAMPIRAN 2

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (X1)

No.Res	Jawaban Responden Variabel (X1)								Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	5	5	4	4	4	4	4	4	34
2	4	5	4	4	5	5	5	4	36
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	4	5	5	4	5	5	4	5	37
5	4	4	4	4	3	4	3	4	30
6	5	4	3	4	3	5	3	5	32
7	4	5	5	4	4	5	5	5	37
8	4	5	5	4	5	4	4	5	36
9	5	4	5	5	5	5	5	5	39
10	5	4	5	5	5	5	5	5	39
11	4	5	4	4	3	4	5	4	33
12	5	5	5	5	5	5	5	4	39
13	4	4	3	4	4	3	3	3	28
14	5	5	5	5	5	4	3	4	36
15	4	3	4	4	3	3	4	4	29
16	3	4	4	3	4	4	4	4	30
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	4	5	5	5	5	5	4	38
19	5	4	5	5	3	5	4	4	35
20	4	3	5	3	4	4	5	4	32
21	5	4	5	5	4	4	5	4	36
22	5	5	5	5	5	4	5	4	38
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	3	4	4	3	4	4	3	4	29

25	4	5	4	5	4	4	5	5	36
26	4	4	4	3	4	4	3	4	30
27	5	4	4	4	5	4	5	5	36
28	4	3	4	4	3	4	3	5	30
29	5	5	4	3	3	4	4	4	32
30	5	4	5	5	4	5	5	5	38
31	4	5	5	4	5	4	4	4	35
32	5	5	5	5	5	3	4	4	36
33	4	5	5	4	5	5	5	5	38
34	5	5	5	5	5	3	4	4	36
35	5	5	5	5	5	5	5	5	40

LAMPIRAN 3

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS VARIABEL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (X1)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
P1	Pearson Correlation	1	,231	,375*	,707**	,270	,247	,331	,181	,623**
	Sig. (2-tailed)		,182	,026	,000	,116	,152	,052	,298	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P2	Pearson Correlation	,231	1	,315	,298	,496**	,183	,269	,117	,555**
	Sig. (2-tailed)	,182		,066	,082	,002	,293	,119	,502	,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P3	Pearson Correlation	,375*	,315	1	,532**	,601**	,350*	,540**	,291	,758**
	Sig. (2-tailed)	,026	,066		,001	,000	,039	,001	,090	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P4	Pearson Correlation	,707**	,298	,532**	1	,428*	,257	,428*	,249	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000	,082	,001		,010	,136	,010	,149	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P5	Pearson Correlation	,270	,496**	,601**	,428*	1	,232	,432**	,224	,717**
	Sig. (2-tailed)	,116	,002	,000	,010		,181	,009	,196	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P6	Pearson Correlation	,247	,183	,350*	,257	,232	1	,455**	,587**	,613**
	Sig. (2-tailed)	,152	,293	,039	,136	,181		,006	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P7	Pearson Correlation	,331	,269	,540**	,428*	,432**	,455**	1	,360*	,737**
	Sig. (2-tailed)	,052	,119	,001	,010	,009	,006		,033	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
P8	Pearson Correlation	,181	,117	,291	,249	,224	,587**	,360*	1	,542**
	Sig. (2-tailed)	,298	,502	,090	,149	,196	,000	,033		,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Total SAP	Pearson Correlation	,623**	,555**	,758**	,738**	,717**	,613**	,737**	,542**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	63,6
	Excluded ^a	20	36,4
	Total	55	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,816	8

LAMPIRAN 4

**DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITA
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN (X2)**

No. Res	Jawaban responden Variabel X2								Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	4	4	4	3	3	4	4	4	30
2	3	3	4	4	4	4	4	3	29
3	4	4	4	5	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	4	4	4	5	4	33
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	5	5	5	4	5	5	5	4	38
8	4	3	4	5	5	5	5	5	36
9	4	5	4	5	5	5	5	5	38
10	5	4	4	4	5	4	4	4	34
11	4	3	5	4	4	3	3	4	30
12	4	3	3	4	4	4	3	3	28
13	5	5	5	4	5	4	5	5	38
14	5	3	4	4	4	3	4	3	30
15	3	4	4	4	4	4	4	4	31
16	5	4	4	4	4	4	4	4	33
17	4	5	4	4	3	5	5	5	35
18	4	4	5	5	4	4	5	4	35
19	5	4	3	3	4	4	4	5	32

20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	4	4	4	5	5	5	4	35
22	5	5	4	5	5	5	3	5	37
23	3	4	4	4	4	3	3	5	30
24	5	5	5	5	3	4	4	5	36
25	5	5	5	4	3	3	5	5	35
26	5	5	4	4	3	3	4	5	33
27	4	4	4	4	4	3	5	4	32
28	5	5	5	5	5	5	4	5	39
29	4	4	4	4	4	4	4	5	33
30	4	4	4	4	4	4	5	5	34
31	5	5	5	5	5	3	4	5	37
32	3	4	4	4	5	5	5	3	33
33	4	4	4	4	4	5	3	5	33
34	5	5	5	4	5	3	4	5	36
35	4	4	4	4	5	5	4	4	34

LAMPIRAN 5

**UJI VALIDITAS DAN REABILITAS VARIABEL
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN (X2)**

Correlations

	ILK1	ILK2	ILK3	ILK4	ILK5	ILK6	ILK7	ILK8	TotalILK
ILK1 Pearson Correlation	1	,535**	,401*	,198	,135	-,072	,073	,413*	,562**
Sig. (2-tailed)		,001	,017	,255	,440	,681	,678	,014	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK2 Pearson Correlation	,535**	1	,528**	,325	,118	,174	,301	,663**	,772**
Sig. (2-tailed)	,001		,001	,057	,499	,319	,079	,000	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK3 Pearson Correlation	,401*	,528**	1	,474**	,201	-,071	,276	,332	,629**
Sig. (2-tailed)	,017	,001		,004	,247	,685	,108	,051	,000
N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK4 Pearson Correlation	,198	,325	,474**	1	,379*	,290	,149	,294	,629**

	Sig. (2-tailed)	,255	,057	,004		,025	,091	,393	,086	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK5	Pearson Correlation	,135	,118	,201	,379*	1	,441**	,161	,024	,531**
	Sig. (2-tailed)	,440	,499	,247	,025		,008	,356	,890	,001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK6	Pearson Correlation	-,072	,174	-,071	,290	,441**	1	,275	,078	,481**
	Sig. (2-tailed)	,681	,319	,685	,091	,008		,109	,655	,003
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK7	Pearson Correlation	,073	,301	,276	,149	,161	,275	1	,085	,504**
	Sig. (2-tailed)	,678	,079	,108	,393	,356	,109		,629	,002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ILK8	Pearson Correlation	,413*	,663**	,332	,294	,024	,078	,085	1	,613**
	Sig. (2-tailed)	,014	,000	,051	,086	,890	,655	,629		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TotallL K	Pearson Correlation	,562**	,772**	,629**	,629**	,531**	,481**	,504**	,613**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,003	,002	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	63,6
	Excluded ^a	20	36,4
	Total	55	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,723	8

LAMPIRAN 6

**DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITAS
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)**

No. Res	Jawaban Responden Variabel Y								Total Skor
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	4	4	4	4	3	31
6	4	4	4	4	5	4	5	5	35
7	5	4	4	5	5	4	4	4	35
8	4	4	4	5	4	5	4	4	34
9	4	4	4	5	5	5	5	4	36
10	5	4	5	4	4	4	4	5	35
11	4	4	4	4	4	4	3	3	30
12	4	3	3	3	3	4	4	5	29
13	5	4	4	4	3	3	4	4	31
14	4	4	3	4	3	4	3	5	30
15	3	4	4	4	3	3	3	3	27
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	5	4	5	4	4	4	4	5	35
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	4	4	4	4	4	4	4	33
20	5	3	4	4	4	5	5	4	34
21	4	3	3	5	5	4	4	5	33
22	4	4	4	5	5	5	3	4	34
23	4	4	4	4	4	5	5	5	35
24	4	4	4	4	5	3	3	4	31
25	5	5	5	4	4	4	4	4	35
26	5	3	3	4	4	4	5	4	32
27	5	5	4	4	3	4	5	4	34
28	4	4	4	4	4	4	4	5	33
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	5	5	5	4	4	35
31	4	4	3	3	4	5	4	5	32
32	4	3	4	5	3	4	5	5	33
33	4	4	4	4	5	5	5	3	34
34	4	4	4	5	5	3	4	5	34
35	5	5	5	5	4	4	3	5	36

LAMPIRAN 7

**UJI VALIDITAS DAN REABILITAS VARIABEL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (X1)**

Correlations

	KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	KLK5	KLK6	KLK7	KLK8	total
KLK1 Pearson Correlation	1	,252	,418 [*]	,043	-,035	,026	,240	,182	
Sig. (2-tailed)		,144	,012	,805	,841	,881	,166	,295	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK2 Pearson Correlation	,252	1	,633 ^{**}	,128	,095	,016	-,160	-,061	
Sig. (2-tailed)	,144		,000	,462	,589	,928	,359	,727	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK3 Pearson Correlation	,418 [*]	,633 ^{**}	1	,290	,157	,000	,000	,000	
Sig. (2-tailed)	,012	,000		,091	,369	1,000	1,000	1,000	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK4 Pearson Correlation	,043	,128	,290	1	,509 ^{**}	,209	,075	,112	
Sig. (2-tailed)	,805	,462	,091		,002	,229	,667	,521	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK5 Pearson Correlation	-,035	,095	,157	,509 ^{**}	1	,354 [*]	,153	,036	
Sig. (2-tailed)	,841	,589	,369	,002		,037	,381	,836	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK6 Pearson Correlation	,026	,016	,000	,209	,354 [*]	1	,445 ^{**}	,092	
Sig. (2-tailed)	,881	,928	1,000	,229	,037		,007	,600	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK7 Pearson Correlation	,240	-,160	,000	,075	,153	,445 ^{**}	1	,186	
Sig. (2-tailed)	,166	,359	1,000	,667	,381	,007		,284	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
KLK8 Pearson Correlation	,182	-,061	,000	,112	,036	,092	,186	1	
Sig. (2-tailed)	,295	,727	1,000	,521	,836	,600	,284		
N	35	35	35	35	35	35	35	35	
total KLK Pearson Correlation	,479 ^{**}	,403 [*]	,553 ^{**}	,577 ^{**}	,587 ^{**}	,556 ^{**}	,516 ^{**}	,409 [*]	
Sig. (2-tailed)	,004	,017	,001	,000	,000	,001	,001	,015	
N	35	35	35	35	35	35	35	35	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	63,6
	Excluded ^a	20	36,4
	Total	55	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,650	8

LAMPIRAN 8

Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implementasi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,633	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
totalSAP	67,17	22,617	,180	,519
totalIPK	68,03	30,793	,030	,712
totalKLK	68,97	17,793	,755	-,541 ^a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

LAMPIRAN 9

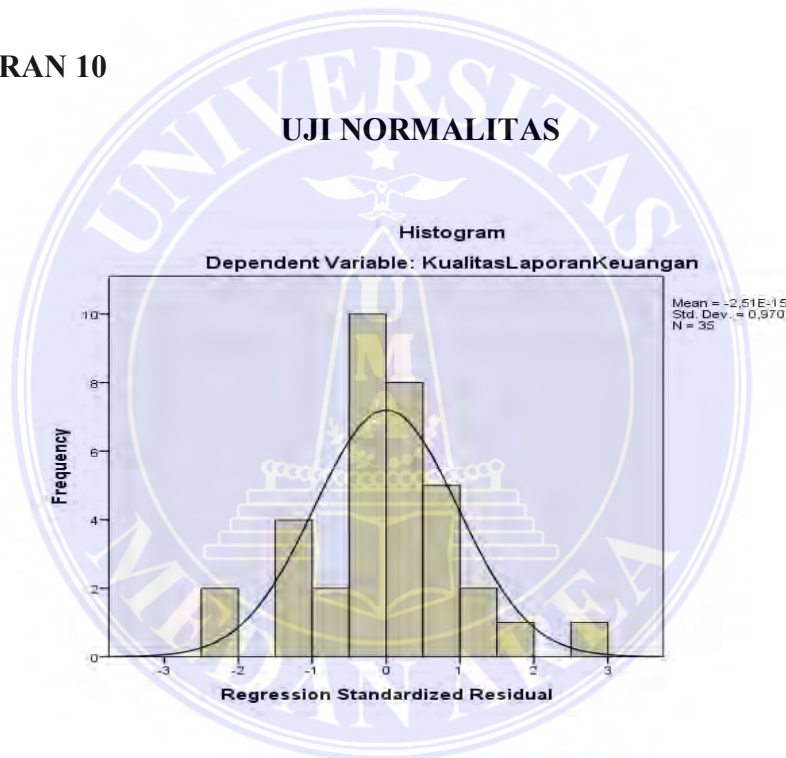
ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,944	5,027		,188	,852
	Standar akuntansi pemerintahan	,506	,087	,687	5,825	,000
	Implementasi pengelolaan keuangan	,425	,100	,503	4,267	,000

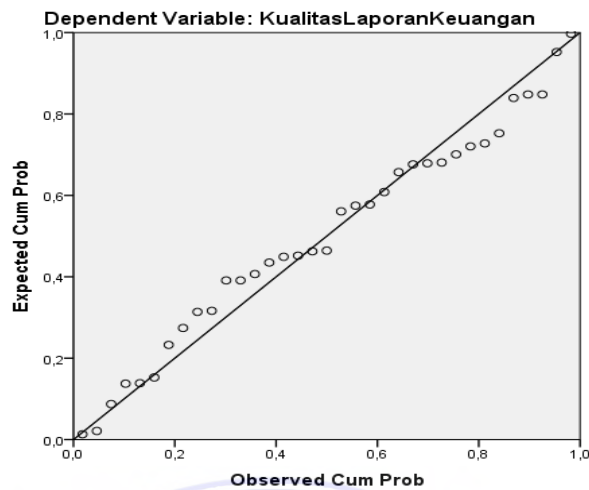
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

LAMPIRAN 10

UJI NORMALITAS



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,72125421
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,098
	Negative	-,102
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

LAMPIRAN 11

UJI MULTIKOLINEARITAS

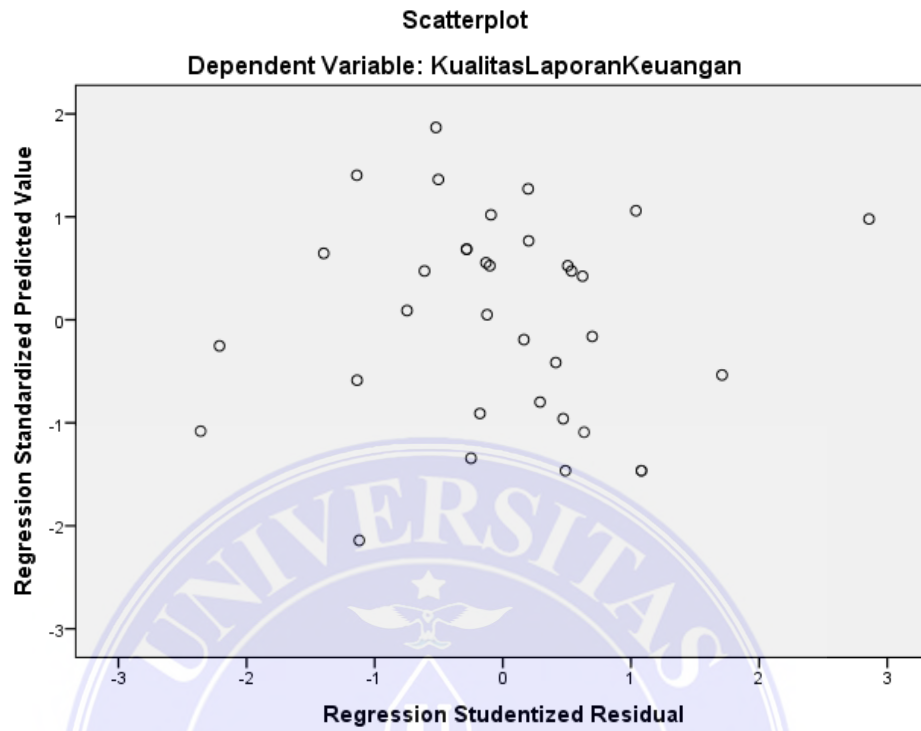
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,944	5,027		,188	,852		
TotalSAP	,506	,087	,687	5,825	,000	,954	
TotalIPK	,425	,100	,503	4,267	,000	,954	

a. Dependent Variable: Total kualitas laporan keuangan

LAMPIRAN 12

UJI HETEROSKEDASTISITAS



LAMPIRAN 13

KOEFSIEN DETERMINASI (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,576	,549	1,774

a. Predictors: (Constant), TotalIPK, TotalSAP

b. Dependent Variable: KualitasLaporanKeuangan

LAMPIRAN 14

Uji Signifikan Simultan (Uji f)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136,811	2	68,405	21,731	,000 ^b
	Residual	100,732	32	3,148		
	Total	237,543	34			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Pengelolaan Keuangan

LAMPIRAN 15**Uji Signifikan Parsial (Uji t)****Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,944	5,027		,188	,852
	Standar akuntansi pemerintahan	,506	,087	,687	5,825	,000
	Implementasi Pengelolaan Keuangan	,425	,100	,503	4,267	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan